

## KATA PENGANTAR

Pertama tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala izin serta karuniaNya kita telah dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Periode tahun 2013 s/d 2018, sehubungan dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi mengalami perubahan menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

Penyusunan awal Rancangan Awal Rencana Strategis Periode tahun 2013 s/d 2018 Badan PPKB Kota Jambi ini mengalami perubahan, Perubahan tersebut dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap kegiatan dan anggaran dengan berpedoman kepada indikator serta rencana tingkat capaian yang telah ditentukan, baik dari sasaran maupun dari sisi kegiatan. Pencapaian hasil dari berbagai kegiatan tersebut disusun dalam bentuk narasi serta table untuk memudahkan dipahami.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasinya terhadap berbagai kegiatan Dinas PPKB Kota Jambi didalam mencapai sasaran serta indikator kegiatan kami ucapkan terimakasih.

Jambi, Februari 2017

Kepala Dinas PPKB Kota Jambi



**H.M. Rasyid Rido S, SH, M. Kes**

Pembina Tk I

NIP. 19591203 198212 1 002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) dan obyek (human resources) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (life cycle approach). Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu; (1) berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; (2) berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; (3) mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antar perkotaan dan perdesaan; (4) data dan informasi penduduk; (5) penyerasian kebijakan kependudukan.

Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka kelahiran (fertilitas) dan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia selama ini telah menghasilkan transisi demografi, karena setiap penambahan jumlah penduduk akan berpengaruh kepada daya dukung dan daya tampung dari penambahan tersebut. Melalui pembangunan kependudukan dan KB, harus benar-benar dapat memanfaatkannya. Peluang emas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila: (1) kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi; (2) tersedia kesempatan kerja produktif, agar memungkinkan penduduk usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan ekonomi dan tabungan rumah tangga; (3) tabungan tersebut selanjutnya dapat diinvestasikan kembali untuk menciptakan kesempatan kerja produktif; dan (4) pengendalian penduduk harus dilaksanakan secara maksimal untuk sebagai penunjang dalam penentuan kebijakan.

Pemanfaatan peluang emas tersebut berdampak tidak langsung mengurangi beban pembangunan, sehingga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pembangunan daerah diharapkan dapat terwujud visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jambi tahun 2013-2018.

Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, program Keluarga Berencana (KB) di Kota Jambi mengalami peningkatan secara dinamis yang terjadi selama 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Jambi tahun 2011 jumlah penduduk Kota Jambi sebanyak 540.258 jiwa, tahun 2012 naik menjadi 560.216 jiwa, untuk tahun 2013 naik menjadi 560.188 jiwa dan tahun 2015 naik menjadi 576.067 jiwa atau dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, rata rata kenaikan penduduk adalah

sebesar 8.952 jiwa atau 1,63% setiap tahunnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Ket
1	2006	452.560 Jiwa	BPS Kota Jambi
2	2007	470.902 Jiwa	BPS Kota Jambi
3	2008	523.572 Jiwa	BPS Kota Jambi
4	2009	532.743 Jiwa	BPS Kota Jambi
5	2010	532.881 Jiwa	BPS Kota Jambi
6	2011	540.258 Jiwa	BPS Kota Jambi
7	2012	560.216 Jiwa	BPS Kota Jambi
8	2013	560.188 Jiwa	BPS Kota Jambi
9	2014	568.062 Jiwa	BPS Kota Jambi
10	2015	576.067 Jiwa	BPS Kota Jambi

*SumberData :  
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi*

Dari aspek kualitas penduduk, di Kota Jambi masih ada keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah dengan tingkat pengetahuan yang rendah yang memiliki banyak anak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kebutuhan dasar belum dapat terpenuhi, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Dukungan komitmen yang kuat sangat dibutuhkan baik antara penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, mitra kerja (swasta, LSM, Instansi lintas sektoral maupun masyarakat), dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut juga tidak terlepas dari perencanaan yang matang, baik perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan jangka pendek. Untuk penyusunan perencanaan jangka menengah di SKPD berupa Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

Dalam penyusunan Renstra-SKPD 2013-2018 ini diselaraskan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah serta Rancangan Dokumen RPJM Daerah dan mengimplementasikannya pada tujuan, strategi, kebijakan dan program RPJM Daerah ke dalam Renstra- SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi serta isu strategis yang sedang bermunculan. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah selama masa kepemimpinannya.

Renstra SKPD yang disusun ini diharapkan mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar, yaitu: (i) Bagaimana pelayanan SKPD diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang? (ii) Bagaimana cara mencapainya? Dan (iii) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai?

Oleh karena itu, DPPKB Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus mampu meningkatkan kapasitasnya dalam perencanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..

Dalam kaitan tersebut di atas, DPPKB Kota Jambi perlu memperhatikan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip *good governance* yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Prinsip *good governance* ini telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Dengan demikian, kinerja DPPKB Kota Jambi di masa yang akan datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai *good governance* secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kota Jambi, DPPKB Kota Jambi perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh aparat DPPKB Kota Jambi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis DPPKB Kota Jambi ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

## **I.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD ini meliputi landasan hukum yang bersifat umum dan teknis. Landasan hukum yang secara umum menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD meliputi :

### **1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam pasal 150 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;  
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Selanjutnya dalam pasal 151 dinyatakan bahwa SKPD menyusun Renstra yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, memuat *visi, misi, tujuan, kebijakan, program* dan *kegiatan* pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah yang bersifat *indikatif*.

2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian / Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004, *RPJM daerah* juga merupakan *Renstra Daerah*. Dalam pasal 7 Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Renstra SKPD.

3. Undang- undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025
6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2008-2013.

## **I.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud**

Maksud Penyusunan Renstra SKPD DPPKB Kota Jambi adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani selama lima tahun ke depan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamanatkan oleh RPJMD Pemerintah Kota Jambi 2013 -2018. Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah agar terlaksananya program dan kegiatan yang berkaitan dengan :

1. Terlayannya pasangan usia subur menjadi peserta KB dengan alat kontrasepsi yang tercukupi.

2. Meningkatkan peran PPKBD dan Sub PPKBD.
3. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kegiatan KIE.
4. Meningkatkan fungsi dan peran PIK- KRR.
5. Meningkatkan keterlibatan keluarga didalam kegiatan Bina keluarga.
6. Tersedianya data dan informasi hasil pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB secara cepat , tepat dan akurat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya di Lingkungan Dinas PPKB Kota Jambi.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi tahun 2013-2018 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Jambi yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Jambi dalam upaya mendukung Visi Pemerintah Kota Jambi Periode 2013 s/d 2018 yaitu *“Mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Perdagangan dan jasa yang berbasis pada masyarakat yang berahklak dan berbudaya.”*

Adapun tujuan khusus penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup DPPKB Kota Jambi;
2. Mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi periode 2013-2018.
3. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup DPPKB dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, khususnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya.
4. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
5. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### **I.4. Sistematika Penulisan :**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi**

Berisi uraian tentang Struktur Organisasi DPPKB Kota Jambi, serta kondisi dan potensi personal dan sarana/prasarana juga dalam hal kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi DPPKB Kota Jambi.

##### **BAB III Isu-Isu Strategis**

Berisi uraian ringkas tentang berbagai isu strategis yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan KB.

##### **BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Berisi uraian ringkas tentang Visi dan Misi DPPKB, memuat pola mengenai tujuan serta sasaran dan kegiatan dari setiap kebijakan, selain itu mengungkap mengenai nilai-nilai dasar dan strategi dalam rangka keberhasilan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2018

##### **BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.**

Berisi uraian ringkas tentang program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Jambi selama kurun waktu 2013-2018.

##### **BAB VI Indikator Kinerja DPPKB Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

##### **BAB VII Penutup**

##### **Lampiran- lampiran**

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi**

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya

Susunan Organisasi DPPKB Kota Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi. Adapun Susunan Organisasi pada DPPKB Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut di atas adalah sebagai berikut :

A. Kepala

B. Sekretariat

Tugas : Membantu kepala Dinas dalam melaksanakan tugas kesekretariatan meliputi urusan Perencanaan, Kerumahtanggaan, Kepegawaian, Keuangan dan sarana /aset serta melaksanakan tugas lainnya yang di berikan kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun fungsinya terdiri dari :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Sekretariat membawahi 3 Sub bagian yaitu:

*1. Sub bagian perencanaan*

Tugas : membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bagian perencanaan;
- b. melaksanakan ketatausahaan urusan perencanaan SKPD;
- c. menghimpun dan menyusun rencana kegiatan SKPD;



- d. membuat laporan berkala tahun kegiatan kegiatan SKPD;;
- e. menghimpun dan mengelola usulan program sekretariat dan bidang;
- f. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan melaksanak tugas perencanaan program kerja, penyusunan rencana kerja, akuntabilitas kinerja pemerintah;
- g. mempersiapkan program dan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
- h. mempersiapkann bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran berdasarkan KUA dan PPA;
- i. menyusun bahan rencana pemantauan pengendalain dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan prosedur dan sistem kerja;
- j. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahanya;
- k. menilai presentasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pembinaan karir.

## 2. *Sub bagian keuangan dan Sarana*

Sub Bagian dan sarana mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dan sarana, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan sarana;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentaun perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- f. menyusun laporan realisasi anggaran, setiap bulan, triwulan;
- g. menyusun laporan neraca Dinas setiap triwulan dan akhir tahun;
- h. menyusun catatan atas laporan keuangan;
- i. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di lingkup Dinas;
- j. melaksanakan pencatatan barang inventaris dalam kartu inventaris menurut penggolongan dan kondisi fisik barang;
- k. melaksanakan pencatatan barang inventaris dalam kartu inventaris barang A,B,C,D,E dan F;
- l. melaksanakan dokumentasi kepemilikan selain kendaraan, tanah dan bangunan;

- m. melaksanakan penyiapan bahan sensus barang inventaris sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;
- n. menyusun usulan aset Dinas untuk diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- o. menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- p. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- s. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir;
- t. melaksanakan ketatausahaan perlengkapan/Aset;
- u. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris;
- v. melaksanakan pelaporan aset secara berkala;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Sub bagian tata usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja subbag tata usaha;
- b. melaksanakan tata usaha, kearsipan, kerumahtanggaan;
- c. menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan kepala dinas;
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan walikota;
- e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. mengkoordinir penyusunan SOP dan SPM pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. melaksanakan kegiatan peningkatan disiplin aparatur;
- h. mempersiapkan penyelenggaraan rapat rutin/berkala kantor;
- i. mengusulkan kenaikan pangkat, imfasing, permohonan izin dan tugas belajar, perpindahan dan saksi berat, pemberian tanda penghargaan/ tanda jasa, cuti besar, sakit, bersalin, alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara, pensiun, izin

- perkawinan dan perceraian, karis karsu, askes, taspen, bapetarum, kenaikan gaji berkala kepala satuan kerja perangkat daerah;
- j. memproses, mengelola data dan dokumentasi pegawai yang meliputi kenaikan gaji berkala, cuti tahunan, izin tidak bertugas;
- k. merencanakan, mengusulkan, dan mengadakan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi ASN, serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- l. mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun dan asuransi kesehatan;
- m. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak pribadi;
- n. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- o. melaksanakan penyusunan data base kepegawaian;
- p. melaksanakan penyusunan analisis jabatan dan penyusunan kompetensi jabatan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### B. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Tugasnya membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang penyuluhan dan pergerakan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas yang meliputi Advokasi, Organisasi kemasyarakatan, Pendayagunaan tenaga PKB/PLKB. Adapun fungsinya terdiri dari :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serya organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/ kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan tugas pokok dan fungsi tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e. Pelaksanaa pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pemberiaan bimbingan teknis dan fasilitas di bidang penyuluhan, advokasi dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bidang bidang penyuluhan dan penggerakan membawahi sub bidang yaitu:

##### a. Sub Bidang Penyuluhan dan KIE

Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam urusan Penyuluhan dan KIE, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja sub. bidang Penyuluhan dan KIE;
  - b. Membuat petunjuk teknis pengembangan Penyuluhan dan KIE terhadap masyarakat;
  - c. Melaksanakan penyuluhan dan komunikasi informasi edukasi terhadap masyarakat;
  - d. Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria penyuluhan dan komunikasi edukasi;
  - e. Melaksanakan promosi kesehatan reproduksi remaja, melalui Penyuluhan dan KIE;
  - f. Mempersiapkan Ekspos Provil Kegiatan Dinas;
  - g. Mempersiapkan Kegiatan Kehumasan dan Pameran;
  - h. Mengkoordinir Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
  - i. Mempersiapkan Kendaraan Penerangan KIE;
  - j. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasa Sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan
- Seksi advokasi dan penggerakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian Tugas, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja seksi Advokasi dan Penggerakan;
  - b. Membuat petunjuk teknis pengembangan advokasi dan penggerakan terhadap masyarakat
  - c. Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan penggerakan;
  - d. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi advokasi dan penggerakan;
  - e. Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas seksi advokasi dan penggerakan;
  - f. Menyiapkan laporan bulanan dan tahunan seksi;
  - g. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan atasan Sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Sub Bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP
- Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, mempunyai tugas Membantu kepala Bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan Pengendalian, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
  - b. Menyiapkan petunjuk teknis pengembangan Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;

- c. Melakukan monitoring pelaksanaan program kegiatan PLKB/PKB di tingkat lini lapangan;
- d. Melakukan kunjungan pendekatan bersama PKB/PLKB Kepada tokoh formal/informal dalam rangka pendekatan untuk memperoleh kesepakatan operasional dalam Pengendalian Penduduk dan KB;
- e. Menghimpun bahan-bahan untuk pelaksanaan koordinasi Institusi masyarakat;
- f. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis;
- g. Melakukan Hubungan kerjasama dengan berbagai institusi untuk mendapat dukungan dalam kegiatan koordinasi pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Membuat laporan bulanan, tahunan seksi;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### C. Bidang Keluarga Berencana

Tugasnya membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang keluarga berencana yang meliputi Perencanaan, Penyusunan program, Pengawasan dan pengendalian dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan pelayanan KB;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- i. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana mempunyai sub bidang yaitu:

#### a. Sub bidang Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi

Seksi pengendalian dan pendistribusian alokasi mempunyai tugas membantu kepala bidang keluarga berencana dalam urusan pengendalian dan pendistribusian alokasi, dengan rincian tugas berikut:

- a. menyusun rencana kebutuhan, penyediaan dan penyaluran alat/obat kontrasepsi;

- b. melaksanakan penyediaan sarana dan presarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
- c. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- d. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
- e. melaksanakan pencatatan, pelaporan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi ketersediaan alat/obat kontrasepsi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Sub bidang Jaminan Pelayanan KB

Seksi jaminan pelayanan KB mempunyai tugas membantu kepala bidang keluarga berencana dalam jaminan pelayanan KB, dengan rincian tugas berikut:

- a. menyusun rencana kerja seksi jaminan pelayanan keluarga berencana;
- b. mempersiapkan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- c. menyetarakan dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- d. mendayagunakan kerjasama pelatihan klinis;
- e. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- f. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Sub bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB

Seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan KB mempunyai tugas membantu kepala bidang keluarga berencana dalam urusan Pembinaan dan peningkatan kesertaan KB, dengan rincian tugas berikut:

- a. menyusun rencana kerja seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
- b. mempersiapkan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
- c. monitoring dan evaluasi tingkat drop out peserta keluarga berencana;
- d. mendayagunakan kerjasama lintas program dan lintas sektor;
- e. mengembangkan materi penyelenggaraan jaminan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan penyuluh keluarga berencana/PKB;
- f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi keluarga berencana pria dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

- g. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

D. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi Perencanaan, penyusunan program, pengawasan dan pengendalian, melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja (PIK-R);
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai sub bidang yaitu:

a. Sub bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas membantu kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam urusan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan rincian tugas berikut:

- a. menyusun rencana seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;
- b. menyiapkan pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera serta pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- c. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala daerah;
- d. melaksanakan pendampingan / magang bagi para kader / anggota kelompok UPPKS;
- e. menyiapkan pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;

- f. Melaksanakan penyusunan pengembangan UPPKS sebagai lembaga ekonomi keuangan mikro dan penyusunan kriteria dalam pengembangan keterampilan anggota UPPKS;
  - g. membina, mengkoordinasikan kelompok UPPKS dan kelompok usaha peningkatan ekonomi keluarga lainnya;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang peningkatan ekonomi keluarga;
  - i. melakukan kerjasama dengan lintas sektoral, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - j. membuat laporan bulanan dan tahunan;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- b. Sub bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
- Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia mempunyai tugas membantu kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam urusan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, dengan rincian tugas berikut :
- a. menyusun rencana kerja seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
  - b. menyiapkan pelaksanaan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis tentang bina keluarga balita (BKB), dan bina keluarga lansia (BKL) dan kelompok KB lainnya;
  - d. melakukan pembinaan teknis terhadap bina keluarga balita (BKB) dan bina keluarga lansia (BKL);
  - e. membuat laporan bulanan dan tahunan;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- c. Sub bidang Bina Ketahanan Remaja
- Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam urusan Bina Ketahanan Remaja, dengan rincian tugas berikut:
- a. meyusun rencana kerja seksi bina ketahanan remaja;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan PIK remaja /mahasiswa, bina keluarga ramaja (BKR);
  - c. menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
  - d. menyiapkan bahan penetapan fasilitas pelaksanaan KKR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antar sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
  - e. menyiapkan bahan penetapan sasaran dan penetapan prioritas KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;



- f. melaksanakan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
- g. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### E. Bidang Pengendalian Penduduk

Kepala bidang pengendalian penduduk mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang operasional pengendalian penduduk yang meliputi perencanaan, penyusunan program, pengawasan dan pengendalian dan bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem Informasi keluarga;
- c. Pelaksanaan Kebijakan daerah dibidang sistem Informasi keluarga;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk kota;
- f. Pembinaan monitoring dan evaluasi lingkup pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian penduduk, pemetaan perkiraan (parameter) informasi penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h. Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bidang pengendalian penduduk membawahi sub bidang yaitu:

##### a. Sub bidang Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

Seksi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk mempunyai tugas membantu kepala bidang pengendalian penduduk dalam urusan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dengan rincian tugas sebagai berikut :

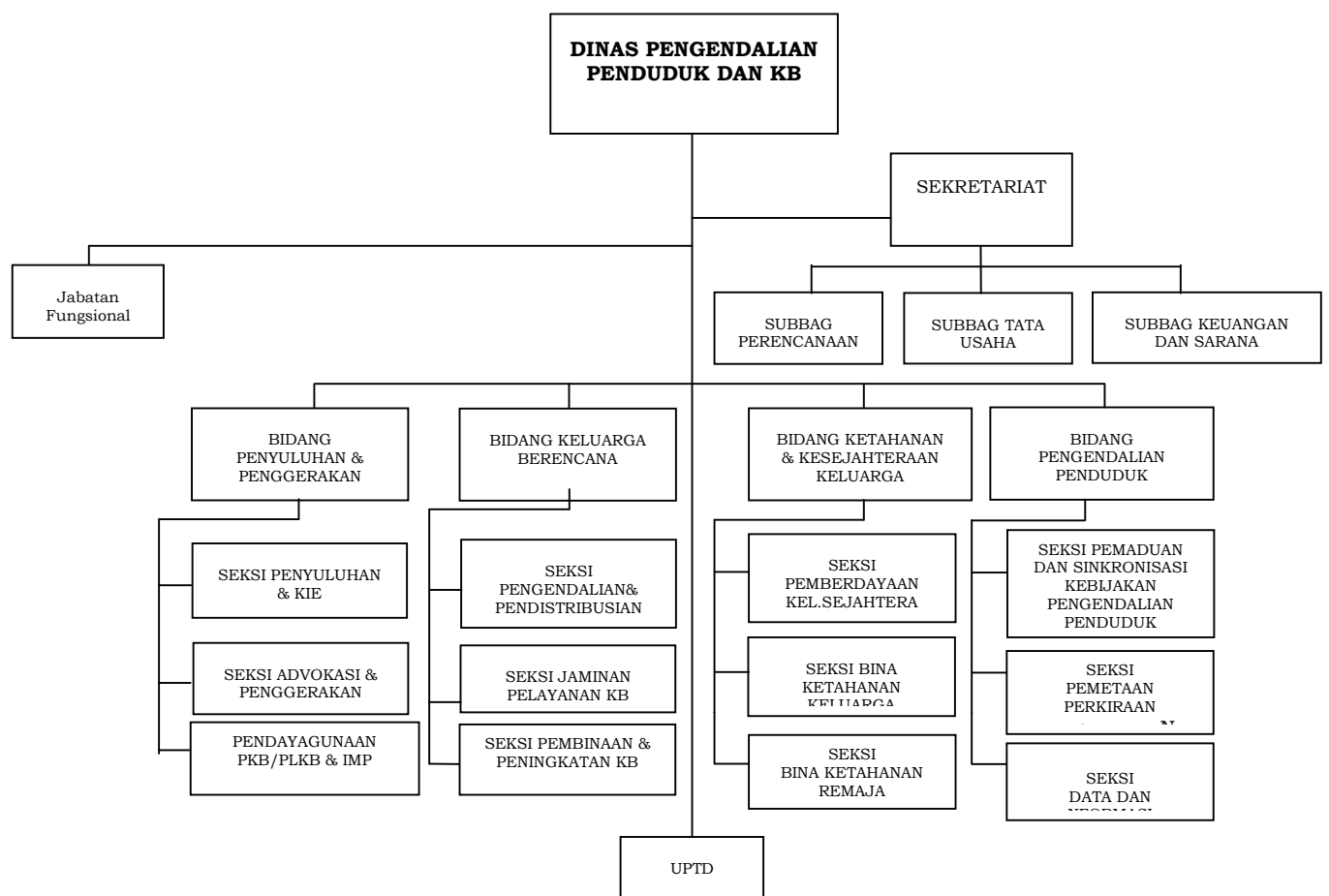
- a. menyusun bahan rencana kerja lingkup pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- b. menyiapkan bahan untuk melaksanakan kebijakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- c. menyusun konsep kegiatan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- d. menyiapkan bahan strategi pelaksanaan program pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;

- e. menyiapkan bahan untuk konsep pelaksanaan juklak dan juknis (pedoman) pelaksanaan program pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberi atasan sesuai dengan tugasnya.
- b. Sub bidang Seksi Data dan Informasi
- Seksi data dan informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang pengendalian penduduk dalam urusan data dan informasi dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja seksi data dan informasi;
  - b. menghimpun bahan – bahan data dan informasi;
  - c. melaksanakan operasional sistem informasi manajemen program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
  - d. melaksanakan pemutakhiran, pengelolaan dan penyediaan data keluarga;
  - e. mengolah dan menganalisa serta evaluasi data dan informasi pogram Dinas PPKB;
  - f. memanfaatkan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan egovernment dan melaksanakan informasi ;
  - g. menetapkan sasaran program Dinas PPKB;
  - h. membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
  - i. melaksanakan tugas lain yang memberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### F. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinis oleh seseorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- d. Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kepangkatan.
- e. Jumlah tenaga fungsional berdasarkan kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah.
- f. Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Untuk lebih jelas dari Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi maka dapat dilihat pada skema berikut ini :



## 2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi

### A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Adapun sumberdaya manusia sebagai potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dapat dilihat di bawah ini :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
A.	<b>TINGKAT PENDIDIKAN.</b>		
	SD	0	
	SLTP	1	
	SLTA	20	
	D1	2	
	D3	4	
	S1	44	
	S2	5	
B	<b>GOLONGAN</b>		
	GOLONGAN II	6	
	GOLONGAN III	40	
	GOLONGAN IV	30	
C	<b>ESSELON</b>		
	ESSELON II	1	
	ESSELON III	5	
	ESSELON IV	15	
D	PEGAWAI STRUKTURAL/STAF KANTOR	29	
	PEG. FUNGSIONAL/PKB	47	
E	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	44	
	PEREMPUAN	32	
	<b>J U M L A H</b>	<b>76</b>	

#### **A. Aset yang dikelola**

Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Perkantoran.	1.572 M <sup>2</sup>	
	Luas Tanah	466 M <sup>2</sup>	
2.	Luas Gedung		
	Kendaraan.		
3.	Roda 4.	4 Unit	15 Unit kendaraan Roda 2 dalam keadaan
4.	Roda 2.	86 Unit	Rusak berat/ proses
5.			usulan lelang
6.	Komputer	56 Unit	
7.	Printer	75 Unit	
8.			30 unit ada di PLKB
9.	Handi Cam	2 Buah	
10.	Proyektor LCD	2 Buah	
11.			
12.	Lap Top	38 Buah	
13.			19 unit ada di PLKB
	OHV	2 Buah	
	AC Window	21 Buah	
	Kipas Angin	31 Buah	
	Wirrelles Mix	19 unit	12 unit ada di PLKB
	Televisi	9 unit	16 unit di PLKB
	DVD Player	2 unit	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PPKB Kota Jambi

#### A. Kinerja Pelayanan Dinas PPKB Kota Jambi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, juga melakukan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB dengan harapan dapat meningkatkan kuantitas peserta KB baru setiap tahun sebesar 100%, meningkatkan kuantitas peserta KB aktif setiap

tahun sebesar 66 % dari jumlah pasangan usia subur, menurunkan Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi (unmet need) sebanyak 10 %, meningkatkan cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) yang ber-KB sebesar 70%, meningkatkan cakupan PUS sebagai anggota UPPKS yang ber-KB sebesar 87%, meningkatnya ratio petugas pembina KB desa (PPKBD) sebesar 100%, meningkatnya cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sebesar 100%, meningkatnya cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan sebesar 100%.

## **B. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas PPKB Kota Jambi**

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi akan berjalan pada tahun berlangsung yaitu tahun 2017.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

2.4.1 Tantangan Pelayanan SKPD yang mempengaruhi pelayanan adalah:

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekuensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini untuk menghadapi tantangan dimasa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks.

2.4.2 Peluang Pelayanan Dinas PPKB Kota Jambi terdiri dari

- a. Adanya Komitmen Walikota Jambi, DPRD Kota Jambi dan Instansi Terkait untuk mendukung pelaksanaan program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi
- b. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak lembaga-lembaga terkait
- c. Tersedianya Grand Design pada Dinas PPKB Kota Jambi
- d. Mudahnnya masyarakat memperoleh informasi tentang KB
- e. Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun
- i. Adanya tujuan organisasi yang jelas, target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dan Keluarga Berencana**

Perubahan Perencanaan pelayanan pada SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2013-2018 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan pada SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018 tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama Rencana Strategi (Renstra) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan SKPD dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2008-2013. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

**A. Urusan Pengendalian Penduduk**

- a. Penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan

- b. Penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan
- c. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan.

#### B. Urusan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

- a. Proyeksi jumlah penduduk Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan, menurut data BPS Kota Jambi jumlah penduduk Kota akhir tahun 2015 adalah 576.067 jiwa..
- b. Terbatasnya petugas lapangan dalam melaksanakan pembinaan program KB dibandingkan dengan cakupan pembinaan kelestarian ber KB.
- c. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja masih rendah.
- d. Pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja.
- e. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil.
- f. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB MKJP.
- g. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi pria dalam ber-KB
- h. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga yang masih tinggi.
- i. Masih rendahnya pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB
- j. Belum optimalnya kinerja dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
- k. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana.
- l. Jumlah keluarga dalam katagori prasejahtera dan sejahtera-1 masih tinggi
- m. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak.
- n. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan keluarga sejahtera dan kesadaran akan arti penting penguatan keluarga sebagai basis ketahanan sosial masyarakat.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah: *" Mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Perdagangan dan jasa yang berbasis pada masyarakat yang berahklak dan berbudaya".*



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi juga mempunyai tugas terkait dengan visi dan misi Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi yakni :

1. Penanggulangan Kemiskinan di Kota Jambi terutama penekanan penambahan jumlah kelahiran pada keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah.
2. Meningkatkan Ketahanan Keluarga secara umum dan secara khusus memfokuskan pada Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 karena Alasan Ekonomi.

Mengingat permasalahan-permasalahan yang ada saat ini yang menjadi faktor penghambat adalah :

1. Masih kurangnya ASN dilingkup DPPKB baik itu petugas Fungsional khusus atau Fungsional umum.
2. Kurangnya tenaga Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat Kelurahan yang merupakan ujung tombak program KB karena mereka sudah beralih tugas ke SKPD diluar SKPD-KB dan purna tugas tidak diimbangi dengan penambahan atau pengantian melalui pengadaan pegawai.
3. Belum adanya uraian tugas pokok dan fungsi Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat Kelurahan.
4. Rendahnya Tingkat Pengetahuan dan Ketrampilan pengelolaan Program KB Nasional bagi IMP (PPKBD, Sub. PPKBD, Kelompok KB).
5. Rendahnya pengetahuan Sikap dan Perilaku tentang BKB, BKR, BKL, BLK dan UPPKS bagi pengelola.
6. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana serta kapasitas aparatur pelayanan KB..

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi periode 2013-2018 antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kompetensi provider bagi Bidan dan Dokter melalui pelatihan klinis IUD, MOP dan MOW dengan pemberian informed consent sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat di klinik KB Pemerintah dan Swasta.
- b. Pemanfaatan secara maksimal hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang KB selama 6 (enam) Tahun terakhir (tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013, 2016) yang berupa pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB, untuk meningkatkan kualitas pelayanan SKPD.
- c. Peningkatan pembinaan dan penggerakan lini lapangan dengan mendorong upaya peningkatan kualitas tenaga lapangan dengan pelatihan maupun pembinaan organisasi profesi Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpKB).

- d. Komitmen mitra kerja dengan lintas sektoral, Pemerintah Daerah, Swasta, LSM dan masyarakat sampai saat ini berpeluang untuk lebih ditingkatkan dalam mendukung kebijakan program KB Nasional di Kota Jambi.

### **3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra**

Sasaran dari Renstra Kementerian/Lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

- 1) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
- 2) Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
- 3) Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
- 4) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
- 5) Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)
- 6) Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

Dari uraian sasaran jangka menengah yang ada pada Renstra BKKBN pusat 2015-2019 tersebut diatas, dibawah ini diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari layanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan layanan SKPD terkait dengan sasaran yang ada pada Renstra Pusat tersebut.

a. Faktor-faktor penghambat :

- a. Kurangnya tenaga Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat Kelurahan yang merupakan ujung tombak program KB karena mereka sudah beralih tugas ke SKPD diluar SKPD-KB dan purna tugas tidak diimbangi dengan penambahan atau pengantian melalui pengadaan pegawai.
- b. Rendahnya Tingkat Pengetahuan dan Ketrampilan pengelolaan Program KB Nasional bagi IMP (PPKBD, Sub. PPKBD, Kelompok KB).
- c. Rendahnya pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) tentang BKB, BKR, BKL, BLK dan UPPKS.
- d. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta kapasitas aparatur pelayanan KB yang rendah.

b. Faktor-faktor pendorong :

- a. Meningkatnya kompetensi provider bagi Bidan dan Dokter melalui pelatihan klinis IUD, MOP dan MOW dengan pemberian informed consent sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat di klinik KB Pemerintah dan Swasta.
- b. Pemanfaatan secara maksimal hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang KB selama 6 (enam) Tahun terakhir (tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013, 2016) yang berupa pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB, untuk meningkatkan kualitas pelayanan SKPD.

- c. Peningkatan pembinaan dan penggerakan lini lapangan dengan mendorong upaya peningkatan kualitas tenaga lapangan dengan pelatihan maupun pembinaan organisasi profesi Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpKB).
- d. Komitmen mitra kerja dengan lintas sektoral, Pemerintah Daerah, Swasta, LSM dan masyarakat sampai saat ini berpeluang untuk lebih ditingkatkan dalam mendukung kebijakan program KB Nasional di Kota Jambi.

### 3.4 Penentuan Isu- isu Strategis

Metode untuk menentukan Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dengan menggunakan analisa SWOT (Strenghts (kekuatan), Weakness (kelemahan), Oppurtunities (peluang), Threats (ancaman) ). Dari analisa SWOT yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditentukan Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Beberapa Isu-isu strategis yang dapat ditentukan adalah sebagai berikut :

#### A. Urusan Pengendalian Penduduk

- a. Penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan
- b. Penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan
- c. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan.
- d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan hukum

#### B. Urusan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

- a. Proyeksi jumlah penduduk Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan, menurut data BPS Kota Jambi jumlah penduduk Kota akhir tahun 2015 adalah 576.067 jiwa..
- b. Terbatasnya petugas lapangan dalam melaksanakan pembinaan program KB dibandingkan dengan cakupan pembinaan kelestarian ber KB.
- c. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja masih rendah.

- d. Pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja.
- e. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil.
- f. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif.
- g. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi pria dalam ber-KB
- h. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga yang masih tinggi.
- i. Masih rendahnya pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB
- j. Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi.
- k. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana.
- l. Jumlah keluarga dalam katagori prasejahtera dan sejahtera-1 masih tinggi
- m. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak.
- n. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan keluarga sejahtera dan kesadaran akan arti penting penguatan keluarga sebagai basis ketahanan sosial masyarakat.

### **3.5 Hasil-Hasil Yang dicapai Dinas PPKB Kota Jambi**

Hasil yang dicapai Dinas PPKB Kota Jambi saat ini belum berjalan karena masih merupakan OPD baru, tetapi bila melihat Hasil-hasil yang dicapai berdasarkan hasil renstra-SKPD periode sebelumnya antara lain:

- a. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk alami melalui indikator TFR.
- b. Menurunnya tingkat kelahiran total ( TFR ) sebesar 0.03 menjadi sekitar 2,53 per perempuan.
- c. Menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera sebesar 0.03 % menjadi 4.12 %.
- d. Menurunnya jumlah Pasangan usia subur ( Pus ) yang tidak terlayani ( Unmet need ) menjadi 10,26 %
- e. Meningkatnya jumlah peserta KB Pria menjadi 2.35 %
- f. Peningkatan Penggunaan metode kontrasepsi non hormonal sebesar 11.18 %  
Meningkatnya partisipasi keluarga dalam kelompok – kelompok kegiatan ( BKB,BKR,BKL.BLK)
- g. Pelayanan bagi peserta KB baru sebanyak 13.899 akseptor, dan peserta KB Aktif sebanyak 68.816 akseptor.

## BAB IV

### Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

#### 4.1 .Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Agar dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dapat memberikan manfaat yang tepat dan benar, serta arah yang jelas maka perlu memiliki visi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi atau organisasi harus dibawa, agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dan merupakan komitmen bersama tanpa ada paksaan dalam upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan 5 (lima) tahun kedepan . Visi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dirumuskan sejalan dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Jambi yang selanjutnya ditetapkan menjadi Visi Pemerintah Kota Jambi (*Mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Perdagangan dan jasa yang berbasis pada masyarakat yang berahklak dan berbudaya*) yaitu sebagai berikut :

***"Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Menuju Kota Jambi Sejahtera dan Berkualitas"***

Misi merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan/program Intansi Pemerintah ingin dicapai. Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi SKPD. Untuk mencapai visi tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi telah menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas.
- b. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas hidup penduduk.
- c. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui peningkatan kesertaan keluarga dalam ber KB, meningkatkan kualitas hak-hak reproduksi, meningkatkan kesertaan keluarga dalam ekonomi keluarga, dan memantapkan pengelolaan program KB dilini lapangan.
- d. Mewujudkan penguatan kelembagaan dan strategi KIE.
- e. Meningkatkan pelayanan KB dan Revitalisasi infrastruktur pelayanan KB
- f. Mewujudkan data dan informasi yang akurat tentang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana.

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PPKB Kota Jambi

Guna memperkuat pembangunan di bidang Sosial-Budaya, maka untuk mewujudkan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi menetapkan tujuan program sebagai berikut :

1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas
2. Terciptanya kesadaran dan budaya masyarakat dalam program KB dan keluarga berkualitas;
3. Terciptanya peningkatan institusi masyarakat perkotaan dan peran serta masyarakat dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Terlaksananya penyerasian pelaksanaan dan pengembangan advokasi dan KIE;
5. Tercapainya peningkatan pengetahuan remaja tentang KRR dan pentingnya Keluarga Kecil Berkualitas serta peningkatan pendewasaan usia perkawinan;
6. Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, serta revitalisasi infrastruktur;
7. Terciptanya data dan informasi yang akurat tentang pengendalian penduduk dan KB;
8. Terciptanya Pembinaan ketahanan dan Keluarga Sejahtera

Dari tujuan tersebut maka dapat ditentukan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
2. Menurunkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 3,5%;
3. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif sebesar 65,8 % pada Tahun 2018;
4. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) sebesar 10,14 % pada tahun 2018;
5. Pelaksanaan dan pengembangan advokasi dan KIE
6. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 (satu) PKB/PLKB untuk setiap 1 (satu) kelurahan pada tahun 2018;
7. Ratio petugas pos Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD dan Sub PPKBD 1 (satu) kader untuk 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) tahun 2018.
8. Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 11 kecamatan (11 Balai Penyuluh KB).
9. Penguatan tingkat institusi masyarakat perkotaan dan peran serta masyarakat;

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.2

### **4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD**

#### **A. Strategi**

1. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis fungsional.
2. Meningkatkan sosialisasi dan promosi program keluarga berencana
3. Meningkatkan peran institusi dalam pelaksanaan program

4. Memaksimalkan petugas yang ada melalui peningkatan ketrampilan dan pengetahuan baik petugas lapangan maupun mitra kerja;
5. Meningkatkan jejaring kemitraan dalam pembinaan keluarga balita, anak, remaja, lanjut usia dan rentan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
6. Meningkatkan advokasi pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan KB terhadap pemangku kebijakan
7. Memberikan data dan informasi hasil pelaksanaan program yang akurat, valid dan tepat waktu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan program kedepan.

## **B. Kebijakan**

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi telah dirumuskan kebijakan antara lain :

- a. Meningkatkan penguatan kelembagaan melalui penataan sistem perencanaan kinerja aparatur
- b. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam mendukung pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta validasi data dan informasi.
- c. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program pengendalian penduduk dan KB.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur dalam melaksanakan program PP dan KB.
- e. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan pengendalian penduduk serta pelayanan KB.
- f. Meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif mendukung program pengendalian penduduk dan KB melalui advokasi dan KIE.

**BAB V**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,**  
**Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Pada Bab ini diuraikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan guna mendukung visi misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi yang telah berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya dapat mendukung dan mewujudkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi periode 2013-2018. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.



**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS PPKB KOTA JAMBI YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada Bab ini diuraikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan guna mendukung visi misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi yang telah berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya dapat mendukung dan mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jambi periode 2013-2018.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi melaksanakan 2 (dua) Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Urusan Keluarga Berencana serta penunjang : Sekretariat, Data dan Informasi.

Untuk Urusan Wajib Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari kegiatan :

- 1) Pembinaan dan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 2) Kegiatan institusi dan partisipasi masyarakat serta KIE
- 3) Bantuan Operasional KB
- 4) Pembinaan dan operasional ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- 5) Pengadaan Konstruksi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana

Selain penjabaran program dan kegiatan tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi juga harus melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010, meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2015-2019 yang terdiri dari :

- a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS):
  1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 3,5%;
  2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif sebesar 65,8 % pada Tahun 2018;
  3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) sebesar 10,14 % pada tahun 2018;
  4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70% pada tahun 2018;
  5. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 87% pada tahun 2018;

6. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 (satu) PKB/PLKB untuk setiap 1 (satu) desa/kelurahan pada tahun 2018;
7. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD pada tahun 2018 dan dua Rukun Tetangga (RT) satu Sub PPKBD.

b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi:

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% per tahun.

c. Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa sebesar 100% pada tahun 2018.

Adapun dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas PPKB Kota Jambi melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas PPKB Kota Jambi tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Utama  
Dinas PPKB Kota Jambi

MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing	Terkendalinya Angka Kelahiran Penduduk	Cakupan PUS peserta KB yang ber KB

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Penyusunan dokumen perubahan Rencana Strategis ini merupakan pengembangan dari program-program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jambi, terutama terkait dengan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2013-2018 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), sehingga dari tahun ke tahun dapat disusun suatu rencana yang berkesinambungan, menyeluruh dan konsisten.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 perlu dukungan, peran serta dari para stakeholders, selain itu juga Renstra-SKPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Dengan tersusunnya Renstra-SKPD Tahun 2013-2018 ini kami harapkan dapat digunakan untuk peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program, peningkatan kualitas perencanaan dan peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

Jambi, Februari 2017

Kepala Dinas PPKB Kota Jambi



**H.M. Rasyid Rido S, SH, M. Kes**

Pembina Tk I

NIP. 19591206 198212 1 002

**TABEL 5**  
**RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI**  
**PERIODE 2013 S/D 2018**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas PPKB Kota Jambi sebagai Penanggungjawab	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BPPKB			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Jumlah pelayanan administrasi yang diberikan	05 01 11 01 01 01 1	<b>PROG: PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.</b>																
			05 01 11 01 01 01 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat dan penyediaan benda pos		12 bln	5.430.000	12 bln	5.973.000	12 bln	6.570.300	12 bln	7.254.000	12 bln	57.654.000	5 thn	82.881.300	Dinas BPPKB	
			05 01 11 01 01 02 2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa Telp daya air dan listrik		12 bln	69.200.000	12 bln	76.120.000	12 bln	83.732.000	12 bln	107.640.000	12 bln	118.404.000	5 thn	455.096.000	Dinas BPPKB	
			05 01 11 01 01 02 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya penyediaan jasa Telp daya air dan listrik		1 pkt	11.900.000	1 pkt	13.090.000	1 pkt	14.399.000	1 pkt	16.100.000	1 pkt	17.710.000	5 thn	73.199.000	Dinas BPPKB	
			05 01 11 01 01 07 4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Adm Pengelolaan keuangan daerah		9 bln	87.490.000	12 bln	96.239.000	12 bln	105.862.900	12 bln	126.360.000	12 bln	176.760.000	5 thn	592.711.900	Dinas BPPKB	
			05 01 11 01 01 08 5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bhn pembersih, alat dan jasa kebersihan		12 bln	60.015.000	12 bln	66.016.500	12 bln	72.618.150	12 bln	63.547.100	12 bln	77.947.100	5 thn	340.143.850	Dinas BPPKB	
			05 01 11 01 01 10 6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK administrasi perkantoran		1 thn	26.189.700	1 thn	28.808.670	1 thn	31.689.537	1 thn	18.603.900	1 thn	20.464.290	5 thn	125.756.097	DPPKB dan PKB	
			05 01 11 01 01 11 7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan/form dan kop		1 thn	11.927.500	1 thn	13.120.250	1 thn	14.432.275	1 thn	12.600.000	1 thn	13.860.000	5 thn	65.940.025	Pegawai DPPKB	
			05 01 11 01 01 12 8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya lampu penerangan dan instalasi listrik		1 thn	8.000.000	1 thn	8.800.000	1 thn	9.680.000	1 thn	9.950.000	1 thn	10.945.000	5 thn	47.375.000	Pegawai DPPKB	
			05 01 11 01 01 12 9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya lampu penerangan dan instalasi listrik		1 thn	18.400.000	1 thn	20.240.000	1 thn	22.264.000	1 thn	-	1 thn	-	5 thn	60.904.000	Pegawai DPPKB	
			05 01 11 01 01 15 10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya koran harian 7 eks/hr		1 thn	7.560.000	1 thn	8.316.000	1 thn	9.147.600	1 thn	2.000.000	1 thn	2.200.000	5 thn	29.223.600	Pegawai DPPKB	
			05 01 11 01 01 17 11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat		1 thn	13.940.000	1 thn	15.334.000	1 thn	16.867.400	1 thn	13.000.000	1 thn	14.300.000	5 thn	73.441.400	Pegawai DPPKB	
			05 01 11 01 01 18 12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan rapat diluar daerah		1 thn	130.000.000	1 thn	143.000.000	1 thn	157.300.000	1 thn	-	1 thn	-	5 thn	430.300.000	Pegawai DPPKB	
05 01 11 01 01 19 13	Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakhti dan penjaga malam	Tersedianya jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakhti dan penjaga malam		1 thn	207.360.000	1 thn	228.096.000	1 thn	250.905.600	1 thn	105.600.000	1 thn	134.400.000	5 thn	926.361.600	Dinas BPPKB				
05 01 11 01 01 18 14	Perjalanan Dinas	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar			-		-		-	1 thn	270.000.000	1 thn	300.000.000	5 thn	570.000.000	Pegawai DPPKB				
05 01 11 01 02 2	<b>PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>																			
05 01 11 01 3 30 1	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan gedung kantor		1 pkt	42.600.000	1 pkt	1.149.560.000	1 pkt	1.116.602.000	-	-	-	-	-	-	2.308.762.000	Dinas BPPKB			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Jumlah sarana dn prasarana yang mendukung kinerja aparatur	05 01 11 01 02 05 2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas/operasional		2 R.4	449.010.000	1 R.4	195.000.000	1 R.4	195.000.000	-	230.000.000	-	200.000.000	5 thn	1.269.010.000	Dinas BPPKB
			05 01 11 01 02 07 3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya penyediaan kelengkapan gedung kantor		1 thn	104.400.000	1 thn	114.840.000	1 thn	126.324.000	1 thn	215.200.000	1 thn	215.200.000	5 thn	775.964.000	Dinas BPPKB
			05 01 11 01 02 08 4	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya penyediaan mebeleur		1 thn	133.840.000	1 thn	147.224.000	1 thn	161.946.400	1 thn	-	1 thn	-	5 thn	443.010.400	Dinas BPPKB
			05 01 11 01 02 08 4	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan kerja		1 thn	124.200.000	1 thn	136.620.000	1 thn	150.282.000	1 thn	-	1 thn	-	5 thn	411.102.000	Dinas BPPKB
			05 01 11 01 02 22 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan perkarangan		1 thn	49.000.000	1 thn	53.900.000	1 thn	59.290.000	1 thn	-	1 thn	-	5 thn	162.190.000	Dinas BPPKB
4			05 01 11 01 01 06 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional terdiri dari 6 unit R.4 & 70 unit R.2	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas		12 bln	335.100.000	12 bln	368.610.000	12 bln	405.471.000	12 bln	-	12 bln	-	5 thn	1.109.181.000	Dinas BPPKB
4			05 01 11 01 01 06 7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan									447.200.000	12 bln	491.920.000	5 thn	939.120.000	Dinas BPPKB
			05 01 11 01 02 30 8	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala alat kantor		1 thn	15.000.000	1 thn	16.500.000	1 thn	18.150.000	1 thn	17.160.000	1 thn	18.876.000	5 thn	85.686.000	Dinas BPPKB
			05 01 11 01 02 42 9	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah/Gedung Kantor, terdiri dari	Terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor		1 thn	107.250.000	1 thn	117.975.000	1 thn	129.772.500	1 thn	-	1 thn	-	5 thn	354.997.500	
			05 01 11 01 02 22 10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Balai Penyuluh KB	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan perkarangan		1 thn	-	-	-	8 balai	120.000.000	8 balai	-	8 balai	-	5 thn	120.000.000	
			05 01 11 01 3 30 11	Pembangunan Gedung Kantor UPT P2TP2A	Terlaksananya Pembangunan gedung kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05 01 11 01 03 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>															
			05 01 11 01 03 02 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Penyediaan pakaian pegawai		101,00	40.400.000	-	-	101,00	44.440.000	125,00	50.000.000	125,00	50.000.000	5 thn	184.840.000	Pegawai DPPKB
			05 01 11 01 03 02 2	Penyediaan pakaian dinas (PDH)	Terlaksananya Penyediaan pakaian dinas (PDH)		-	-	101,00	46.500.000	-	-	98,00	-	-	-	5 thn	46.500.000	
			05 01 11 01 03 02 3	Penyediaan pakaian batik	Terlaksananya Penyediaan pakaian batik		-	-	101,00	46.500.000	-	-	101,00	-	-	-	5 thn	46.500.000	
			05 01 11 01 03 02 4	Penyediaan pakaian olah raga	Terlaksananya Penyediaan pakaian olah raga		-	-	-	-	101,00	39.200.000	-	-	101,00	-	5 thn	39.200.000	
			05 01 11 01 05 4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>															
		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	05 01 11 01 05 03 1	Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya keikutsertaan dalam Bintek		1 thn	20.000.000	1 thn	22.000.000	1 thn	24.200.000	1 thn	15.000.000	1 thn	15.000.000	5 thn	96.200.000	Pegawai DPPKB
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis fungsional	05 01 11 01 05 04 2	Penilaian Angka Kredit	Terlaksananya penilaian angka kredit fungsional dan kenaikan pangkat		1 thn	79.255.000	1,00	87.180.500	1,00	95.898.550	1,00	22.845.000	1,00	25.129.500	5 thn	310.308.550	Pegawai DPPKB
			05 01 11 01 06 5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>															
			05 01 11 01 06 01 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan tahunan/semester (Lakip, Tapkin, keuangan)		1 thn	19.912.000	1 thn	21.903.200	1 thn	24.093.520	1 thn	12.400.000	1 thn	13.640.000	5 thn	91.948.720	Pegawai DPPKB

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			05	01	11	01	06	6	<b>PROGRAM PERENCANAAN SKPD</b>																
			05	01	11	01	7	01	3	Penyusunan RKA	Terlaksananya penyusunan RKA, RKT dan Renja		1 pkt	15.260.000	1 pkt	16.786.000	1 pkt	18.464.600	1 pkt	10.300.000	1 pkt	11.330.000	5 thn	72.140.600	Pegawai DPPKB
			05	01	11	01	06	7	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>																
			05	01	11	01	7	01	3	Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya kegiatan penyediaan data dan evaluasi program		-	-	-	-	470.000.000	1 thn	517.000.000	5 thn	987.000.000	Pegawai DPPKB			
			05	01	11	01	16	6	<b>PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																
Tercapainya kesetaraan dan keadilan Gender melalui terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga ;	2	Semua perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih;	05	01	11	01	16	02	1	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pel. Terpadu PP (P2TP2A)	Terlaksananya pengembangan pusat pelayanan terpadu PP		1 thn	157.301.000	1 thn	173.031.100	1 thn	190.334.210	1 thn	-	1 thn	-	5 thn	520.666.310	
Tercapainya pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari tindakan diskriminasi,	3	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum sebesar 60 % ;	05	01	11	01	16	02	2	Kajian pembentukan UPT P2TP2A	Terlaksananya kajian untuk membentuk UPT P2TP2A		-	0	1 pkt	45.000.000	1 pkt	35.000.000	-	-	-	0	5 thn	80.000.000	
		Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di delapan kecamatan (8 Balai Penyuluh KB dan 1 (satu) Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).								Kajian pembentukan PERDA perlindungan anak	Terlaksananya kajian untuk membentuk Perda Perlindungan Anak		-	0	1 pkt	45.000.000	1 pkt	35.000.000	-	-	-	0	5 thn	80.000.000	
		Meningkatnya penguatan kelembagaan pengArustamaan gender	05	01	11	01	16	05	3	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Anak	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender anak		1 thn	247.493.650	1 thn	272.243.015	1 thn	299.467.317	1 thn	-	1 thn	-	5 thn	819.203.982	
	4	Pengelolaan rumah pintar dalam rangka membangun kreatifitas dan kecerdasan anak.	05	01	11	01	16	11	4	Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan rumah pintar		1 thn	44.481.250	1 thn	48.929.375	1 thn	53.822.313	1 thn	-	1 thn	-	5 thn	147.232.938	
	5	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	05	01	11	01	18	01	1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan		1 thn	384.655.000	1 thn	423.120.500	1 thn	465.432.550	1 thn	-	1 thn	-	5 thn	1.273.208.050	
									2	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup prdi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Terlaksananya perumusan kebijakan peningkatan kualitas		-	-	1 thn	-	1 thn	-	1 thn	-	1 thn	-	5 thn	-	
Pengendalian Penduduk Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga		Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	05	01	12	01	15	8	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>																
Terciptanya kesadaran dan budaya masyarakat dalam program KB dan keluarga berkualitas;	6	Menurunkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 3,5%;	05	01	12	01	15	05	1	Terlaksananya kegiatan pembinaan keluarga berencana	Terlayani KB baru		1 thn	257.283.000	1 thn	283.011.300	1 thn	311.312.430	1 thn	-	1 thn	-	5 thn	851.606.730	
Tercapainya peningkatan pengetahuan remaja tentang KRR dan pentingnya Keluarga Kecil Berkualitas serta peningkatan pendewasaan usia perkawinan;	7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 3,5% pada tahun 2018;	05	01	12	01	15	07	2	Kegiatan Operasional KB dan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya kegiatan operasional KB dan kesehatan reproduksi		1 thn	237.718.000	1 thn	261.489.800	1 thn	287.638.780	1 thn	-	1 thn	-	5 thn	786.846.580	
	8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5,0% pada tahun 2018;	05	01	12	01	17	03	3	Kegiatan Pengadaan Alat Kontrasepsi	Terlaksananya Penyediaan alat/obat kontrasepsi KB bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I		1 thn	115.322.000	1 thn	126.854.200	1 thn	139.539.620	1 thn	-	1 thn	-	5 thn	381.715.820	
Terciptanya peningkatan institusi masyarakat perkotaan dan peran serta masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan dan keluarga	9	1. Penguatan tingkat institusi masyarakat perkotaan dan peran serta masyarakat; 2. Penguatan pengelolaan kelembagaan KB di lini lapangan	05	01	12	01	25	01	4	Keg. Institusi dan Peran Serta Masyarakat (PPKB dan SUB PPKBD)	Terlaksananya pembinaan Institusi Masyarakat pedesaan		745 org	553.772.500	750org	609.149.750	758 org	670.064.725	765 org	-	770 org	-	5 thn	1.832.986.975	

1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Terlaksananya penyerasian pelaksanaan dan pengembangan advokasi dan KIE;	Pelaksanaan dan pengembangan advokasi dan KIE	Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dan masyarakat dalam program pelaksanaan	05	01	12	01	25	02	5	Kegiatan Advokasi dan KIE	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE		1 pkt	404.884.400	1 thn	445.372.840	1 thn	489.910.124	1 thn	-	5 thn	1.340.167.364		
Terciptanya data dan informasi yang akurat tentang pemberdayaan perempuan dan KB;	10 Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang pemberdayaan perempuan dan KB	Terlaksananya kegiatan pengumpulan dan pengolahan data	05	01	12	01	26	01	6	Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data		1 pkt	357.900.000	1 thn	393.690.000	1 thn	433.059.000	1 thn	-	5 thn	1.184.649.000		
		Ketepatan waktu dalam pengolahan dan pelaporan data	05	01	12	01	26	02	7	Kegiatan Pengelolaan Data dan Evaluasi Program	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Evaluasi Program		1 pkt	237.000.000	1 thn	260.700.000	1 thn	286.770.000	1 thn	-	5 thn	784.470.000		
Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, perlindungan perempuan dan anak serta	11 Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 (satu) PKB/PLKB untuk setiap 1 (satu) kelurahan	Jumlah data yang dilaporkan tepat sasaran	05	01	12	01	27	02	8	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/informasi (DAK)	Terlaksananya Penyediaan Notebook		-	-	-	-	-	-	-	-	5 thn	-		
	1. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD dan Sub PPKBD 1 (satu) kader untuk 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) tahun	1. Terkonsentrasinya pekerjaan petugas penyuluh lapangan KB 2. Tersedianya sarana pendukung kerja DAK	05	01	12	01	28	01	9	Pembangunan Balai penyuluhan KB (DAK)	Terlaksananya pembangunan balai penyuluhan KB		4 pkt	787.550.000	-	-	-	-	-	-	-	5 thn	787.550.000	
		Tersedianya transportasi antar jemput akseptor KB	05	01	12	01	28	01	10	Kegiatan Pengadaan Mobil Unit Pengangkut Akseptor (DAK)	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Mobil Unit Pengangkut Akseptor		-	-	-	-	-	-	-	-	5 thn	-		
		Tersedianya jumlah sarana kerja di klinik KB							11	Pengadaan Sarana kerja di klinik KB (DAK)	Tersedianya obgyn bed untuk klinik KB		15 bh	198.000.000	-	-	-	-	15 bh	-	5 thn	198.000.000		
			05	01	12	01	30	01	12	Kegiatan Penyediaan BKB Kit (DAK)	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan BKB Kit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									13	Kegiatan pengadaan Genre Kit (DAK)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									14	Kegiatan pengadaan LCD Proyektor genre Kit (DAK)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									15	Kegiatan pengadaan Laptop Genre (DAK)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									16	Pembinaan dan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi			-	-	-	-	-	1 thn	699.078.500	-	792.678.500	-	1.491.757.000	Dinas BPPKB
									17	Kegiatan institusi dan partisipasi masyarakat serta KIE			-	-	-	-	-	1 thn	852.340.000	-	859.540.000	-	1.711.880.000	Dinas BPPKB
									18	Bantuan Operasional KB			-	-	-	-	-	1 thn	531.050.000	-	730.193.750	-	1.261.243.750	Dinas BPPKB
									19	Pembinaan dan operasional ketahanan dan kesejahteraan keluarga			-	-	-	-	-	1 thn	564.241.500	-	620.665.650	-	1.184.907.150	Dinas BPPKB
									20	Pengadaan Konstruksi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana			-	-	-	-	-	1 thn	727.000.000	-	-	-	727.000.000	Dinas BPPKB
													6.176.000.000		6.651.844.000		7.221.954.400		5.616.470.000		5.505.817.790		31.172.086.190	

**TABEL 4.2**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI**  
**PERIODE 2013 S/D 2018**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Jumlah pelayanan administrasi yang diberikan	05 01 11 01 01 01 1	<b>PROG: PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.</b>					
			05 01 11 01 01 01 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 01 02 2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 01 02 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 01 07 4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 01 08 5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 01 10 6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 01 11 7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 01 12 8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 01 12 9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 thn	1 thn	1 thn		
			05 01 11 01 01 15 10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 01 17 11	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 01 18 12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 thn	1 thn	1 thn		
			05 01 11 01 01 19 13	Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakhti dan penjaga malam	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 01 18 14	Perjalanan Dinas				1 thn	1 thn
		05 01 11 01 02 2	<b>PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>						
		05 01 11 01 3 30 1	Pembangunan gedung kantor	1 thn	1 thn	1 thn			
		Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kinerja aparatur	05 01 11 01 02 05 2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 02 07 3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 02 08 4	Pengadaan Mebeleur	1 thn	1 thn	1 thn		
			05 01 11 01 02 08 4	Pengadaan Peralatan Perkantoran	1 thn	1 thn	1 thn		
			05 01 11 01 02 22 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 thn	1 thn	1 thn		
			05 01 11 01 01 06 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional terdiri dari 6 unit B.d 4 & 70 unit B.d2	1 thn	1 thn	1 thn		
			05 01 11 01 01 06 7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				1 thn	1 thn
			05 01 11 01 02 30 8	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 02 42 9	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah/Gedung Kantor, terdiri dari	1 thn	1 thn	1 thn		
			05 01 11 01 02 22 10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Balai Penyuluh KB			1 thn		
			05 01 11 01 3 30 11	Pembangunan Gedung Kantor UPT P2TP2A					
			05 01 11 01 03 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>					
			05 01 11 01 03 02 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 thn		1 thn	1 thn	1 thn
			05 01 11 01 03 02 2	Penyediaan pakaian dinas (PDH)		1 thn			
			05 01 11 01 03 02 3	Penyediaan pakaian batik		1 thn			
		05 01 11 01 03 02 4	Penyediaan pakaian olah raga			1 thn			
		05 01 11 01 05 4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>						
		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	05 01 11 01 05 03 1	Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
05 01 11 01 05 04 2	Penilaian Angka Kredit		1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn		
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis fungsional	05 01 11 01 06 5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>							
	05 01 11 01 06 01 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn		
	05 01 11 01 06 6	<b>PROGRAM PERENCANAAN SKPD</b>							
	05 01 11 01 7 01 3	Penyusunan RKA	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn		
	05 01 11 01 06 7	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>							
	05 01 11 01 7 01 3	Pengembangan Data/Informasi				1 thn	1 thn		



1	2	3	4						5	6	7	8	9	10			
Tercapainya kesetaraan dan keadilan Gender melalui terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga ;	2	Semua perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih;	Jumlah penyelesaian penanganan pengaduan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan	05	01	11	01	16	02	1	PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 thn	1 thn	1 thn			
				05	01	11	01	16	02	2							Fasilitasi Pengembangan Pusat Pel. Terpadu PP (P2TP2A)
				05	01	11	01	16	02	2							Kajian pembentukan UPT P2TP2A
				05	01	11	01	16	05	3							Kajian pembentukan PERDA perlindungan anak
Tercapainya pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari tindakan diskriminasi,	3	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum sebesar 60 %	Meningkatnya penguatan kelembagaan pengArustamaan gender	05	01	11	01	16	05	3	Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Anak	1 thn	1 thn	1 thn			
				05	01	11	01	16	11	4	Kajian pembentukan PERDA perlindungan anak						
Tercapainya pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari tindakan diskriminasi,	4	Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di delapan kecamatan (8 Balai Penyuluh KB dan 1 (satu) Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di rumah pintar	05	01	11	01	16	11	4	Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar	1 thn	1 thn	1 thn			
				05	01	11	01	18	01	1	Pengelolaan rumah pintar dalam rangka membangun kreatifitas dan kecerdasan anak.						
Tercapainya kesetaraan dan keadilan Gender melalui terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga ;	5	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	Jumlah pembinaan yang dilakukan	05	01	11	01	18	01	1	Pembinaan Organisasi Perempuan	1 thn	1 thn	1 thn			
				05	01	11	01	18	01	2	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup prdi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi						
Pengendalian Penduduk Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga		Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS peserta KB yang ber KB	05	01	12	01	15	8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA							
Terciptanya kesadaran dan budaya masyarakat dalam program KB dan keluarga berkualitas;	6	Menurunkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 3,5%;	Jumlah pembinaan yang dilakukan kepada kelompok binaan yang ada dimasyarakat (BKB,BKR,BKL,PIK KRR dan LPPKSI)	05	01	12	01	15	05	1	Terlaksananya kegiatan pembinaan keluarga berencana	1 thn	1 thn	1 thn			
				05	01	12	01	15	07	2	Kegiatan Operasional KB dan Kesehatan Reproduksi						
Tercapainya peningkatan pengetahuan remaja tentang KRR dan pentingnya Keluarga Kecil Berkualitas serta peningkatan pendewasaan usia perkawinan;	7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 3,5% pada tahun 2018;	1. Jumlah pelayanan KB gratis yang diberikan kepada masyarakat 2. Jumlah remaja yang ikut dalam kelompok PIK KRR	05	01	12	01	15	07	2	Kegiatan Operasional KB dan Kesehatan Reproduksi	1 thn	1 thn	1 thn			
				05	01	12	01	17	03	3	Kegiatan Pengadaan Alat Kontrasepsi						
Tercapainya peningkatan pengetahuan remaja tentang KRR dan pentingnya Keluarga Kecil Berkualitas serta peningkatan pendewasaan usia perkawinan;	8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5,0% pada tahun 2018;	Terlaksananya pendistribusian alkon tepat waktu dan jaminan ketersediaan alkon di klinik KB	05	01	12	01	17	03	3	Kegiatan Pengadaan Alat Kontrasepsi	1 thn	1 thn	1 thn			
				05	01	12	01	25	01	4	Keg. Institusi dan Peran Serta Masyarakat (PPKBD dan SUB PPKBD)						
Terciptanya peningkatan institusi masyarakat perkotaan dan peran serta masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan dan keluarga	9	1. Penguatan tingkat institusi masyarakat perkotaan dan peran serta masyarakat; 2. Penguatan pengelolaan kelembagaan KB di lini lapangan	Meningkatnya jumlah institusi KB	05	01	12	01	25	01	4	Keg. Institusi dan Peran Serta Masyarakat (PPKBD dan SUB PPKBD)	1 thn	1 thn	1 thn			
				05	01	12	01	25	02	5	Kegiatan Advokasi dan KIE						
Terlaksananya penyerasian pelaksanaan dan pengembangan advokasi dan KIE;	10	Pelaksanaan dan pengembangan advokasi dan KIE	Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dan masyarakat dalam program pelaksanaan	05	01	12	01	25	02	5	Kegiatan Advokasi dan KIE	1 thn	1 thn	1 thn			
				05	01	12	01	26	01	6	Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data						
Terciptanya data dan informasi yang akurat tentang pemberdayaan perempuan dan KB;	10	Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang pemberdayaan perempuan dan KB	Terlaksananya kegiatan pengumpulan dan pengolahan data	05	01	12	01	26	01	6	Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data	1 thn	1 thn	1 thn			
				05	01	12	01	26	02	7	Kegiatan Pengelolaan Data dan Evaluasi Program						
Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, perlindungan perempuan dan anak serta revitalisasi infrastruktur;	11	Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 (satu) PKB/PLKB untuk setiap 1 (satu) kelurahan pada tahun 2018; 2. Optimalisasi kinerja Penyuluh lapangan KB	Jumlah data yang dilaporkan tepat sasaran	05	01	12	01	27	02	8	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/informasi (DAK)						
				05	01	12	01	28	01	9	Pembangunan Balai penyuluhan KB (DAK)						
Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, perlindungan perempuan dan anak serta revitalisasi infrastruktur;	11	1. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD dan Sub PPKBD 1 (satu) kader untuk 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) tahun	1. Terkonsentrasinya pekerjaan petugas penyuluh lapangan KB 2. Tersedianya sarana pendukung kerja di KB	05	01	12	01	28	01	9	Pembangunan Balai penyuluhan KB (DAK)	1 thn					
				05	01	12	01	28	01	10	Kegiatan Pengadaan Mobil Unit Pengangkut Akseptor (DAK)						
Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, perlindungan perempuan dan anak serta revitalisasi infrastruktur;	11	1. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD dan Sub PPKBD 1 (satu) kader untuk 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) tahun	Tersedianya sarana pendukung kerja di KB	05	01	12	01	28	01	10	Kegiatan Pengadaan Mobil Unit Pengangkut Akseptor (DAK)						
				05	01	12	01	28	01	11	Pengadaan Sarana kerja di klinik KB (DAK)						
Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, perlindungan perempuan dan anak serta revitalisasi infrastruktur;	11	1. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD dan Sub PPKBD 1 (satu) kader untuk 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) tahun	Tersedianya jumlah sarana kerja di klinik KB	05	01	12	01	30	01	12	Kegiatan Penyediaan BKB Kit (DAK)						
				05	01	12	01	30	01	13	Kegiatan pengadaan Genre Kit (DAK)						
Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, perlindungan perempuan dan anak serta revitalisasi infrastruktur;	11	1. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD dan Sub PPKBD 1 (satu) kader untuk 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) tahun	Tersedianya jumlah sarana kerja di klinik KB	05	01	12	01	30	01	13	Kegiatan pengadaan Genre Kit (DAK)						
				05	01	12	01	30	01	14	Kegiatan pengadaan LCD Proyektor genre Kit (DAK)						
Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, perlindungan perempuan dan anak serta revitalisasi infrastruktur;	11	1. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD dan Sub PPKBD 1 (satu) kader untuk 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) tahun	Tersedianya jumlah sarana kerja di klinik KB	05	01	12	01	30	01	14	Kegiatan pengadaan LCD Proyektor genre Kit (DAK)						
				05	01	12	01	30	01	15	Kegiatan pengadaan Laptop Genre (DAK)						
Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, perlindungan perempuan dan anak serta revitalisasi infrastruktur;	11	1. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD dan Sub PPKBD 1 (satu) kader untuk 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) tahun	Tersedianya jumlah sarana kerja di klinik KB	05	01	12	01	30	01	15	Kegiatan pengadaan Laptop Genre (DAK)						
				05	01	12	01	30	01	16	Pembinaan dan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi						
Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, perlindungan perempuan dan anak serta revitalisasi infrastruktur;	11	1. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD dan Sub PPKBD 1 (satu) kader untuk 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) tahun	Tersedianya jumlah sarana kerja di klinik KB	05	01	12	01	30	01	16	Pembinaan dan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi				1 thn	1 thn	
				05	01	12	01	30	01	17	Kegiatan institusi dan partisipasi masyarakat serta KIE						
Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, perlindungan perempuan dan anak serta revitalisasi infrastruktur;	11	1. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD dan Sub PPKBD 1 (satu) kader untuk 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) tahun	Tersedianya jumlah sarana kerja di klinik KB	05	01	12	01	30	01	17	Kegiatan institusi dan partisipasi masyarakat serta KIE				1 thn	1 thn	
				05	01	12	01	30	01	18	Bantuan Operasional KB						
Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, perlindungan perempuan dan anak serta revitalisasi infrastruktur;	11	1. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD dan Sub PPKBD 1 (satu) kader untuk 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) tahun	Tersedianya jumlah sarana kerja di klinik KB	05	01	12	01	30	01	18	Bantuan Operasional KB				1 thn	1 thn	
				05	01	12	01	30	01	19	Pembinaan dan operasional ketahanan dan kesejahteraan						
Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, perlindungan perempuan dan anak serta revitalisasi infrastruktur;	11	1. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD dan Sub PPKBD 1 (satu) kader untuk 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) tahun	Tersedianya jumlah sarana kerja di klinik KB	05	01	12	01	30	01	19	Pembinaan dan operasional ketahanan dan kesejahteraan				1 thn	1 thn	
				05	01	12	01	30	01	20	Pengadaan Konstruksi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana						
Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, perlindungan perempuan dan anak serta revitalisasi infrastruktur;	11	1. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD dan Sub PPKBD 1 (satu) kader untuk 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) tahun	Tersedianya jumlah sarana kerja di klinik KB	05	01	12	01	30	01	20	Pengadaan Konstruksi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana				1 thn	1 thn	
				05	01	12	01	30	01	20	Pengadaan Konstruksi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana						

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018



PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI